

SASARAN PEMBINAAN UKM UNTUK NAIK KELAS, APAKAH SUDAH TEPAT?

Kemala Febrihadini

Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB

Corresponding Author Email: kfdini@korea.ac.kr, kf.dini23@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu target Indikator Kinerja (IK) Pemerintah Provinsi NTB di bidang ekonomi adalah Peningkatan Skala Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah sebesar 0,1%/ tahun. Pemerintah sudah melakukan yang semestinya dilakukan, sesuai dengan rekomendasi penelitian-penelitian, namun selama tahun 2015-2018 IK tersebut belum tercapai. Melalui studi ini penulis mencoba menggali penyebab ketidak-tercapaian IK dari sisi objek, yaitu UKM yang dibina oleh pemerintah. Menggunakan pendekatan Teori Hirarki Kebutuhan Maslow untuk menggali motivasi UKM mengikuti program pembinaan pemerintah. Hasil survey menunjukkan, hanya 11,67% peserta yang mengikuti program diklat yang dilaksanakan pemerintah karena termotivasi untuk mengembangkan usahanya. Selebihnya, peserta memiliki empat jenis motif lain yang kurang atau bahkan tidak relevan dengan peningkatan skala usahanya.

Keyword: UKM Naik Kelas, Motivasi, Hirarki Kebutuhan Maslow

1. PENDAHULUAN

Provinsi NTB memiliki sejumlah kurang lebih 648.000 unit Usaha Kecil Menengah (UKM)[1] yang setara dengan hampir 99% dari total unit usaha yang ada. Pemerintah sudah berupaya mendorong agar usaha-usaha ini naik kelas ke level yang lebih tinggi melalui program-program seperti pendidikan dan pelatihan, fasilitasi legalitas usaha, serta bantuan mesin/ peralatan. Pemerintah juga menetapkan salah satu Indikator Kinerja di bidang ekonomi yakni Prosentase Peningkatan Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah sebesar 0,1%/ tahun [2]. Namun, pada kenyataannya capaian yang diperoleh tahun 2015-2018 secara rata-rata adalah 0,06%.

Terkait ketidak-tercapaian atau ketercapaian program pemerintah, banyak peneliti membahasnya dari sisi pemerintah selaku subjek program atau pembina. Walis dan Dollery mengangkat mengenai ketidak-mampuan pemerintah (*public management*) itu sendiri sebagai penyebab ketidak-tercapaian programnya [3]. Damoah dkk serta Aladnawi mengungkapkan bahwa salah satu penyebab tidak tercapainya program pemerintah di negara berkembang adalah korupsi [4,5]. Sedangkan, untuk mencapai kesuksesan program, Mpinganjiram mengatakan bahwa pemerintah memerlukan tim koordinasi, sarana prasana yang mendukung, umpan balik dari objek program, dan monitoring-evaluasi yang berkelanjutan [6]; Husain dkk menyarankan agar dilakukan kerjasama pemerintah dan swasta [7].

Pemerintah Provinsi NTB dalam pelaksanaan programnya selalu melaksanakan perencanaan program secara berjenjang dari level yang paling bawah dan perencanaan ini dilakukan 1-2 tahun sebelum rencana anggaran berjalan. Setiap program/ kegiatan yang dilaksanakan memiliki Term of Reference (TOR) yang menjadi panduan untuk pelaksanaan program. Selain itu sejak tahun 2015, pengelolaan keuangan Provinsi NTB sudah memiliki status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karena sadar akan keterbatasan anggaran, pemerintah juga tidak pernah menutup kesempatan kerjasama dengan pihak luar, sudah banyak

kesepakatan yang ditandatangani dengan lembaga-lembaga lain yang ditangani oleh Biro Kerjasama. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi NTB sebenarnya sudah berupaya untuk melakukan segala bentuk pengelolaan untuk pembinaan kepada masyarakat, semaksimal mungkin. Untuk itu, berkaitan dengan ketidak-tercapaian IK, penulis mencoba menggali dari sisi sebaliknya yaitu sisi UKM itu sendiri selaku objek atau penerima program pembinaan dari pemerintah. Penulis menggali motivasi UKM dalam mengikuti program pemerintah menggunakan pendekatan Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, untuk mengetahui apakah tujuan yang dimilikinya sudah selaras dengan tujuan pemerintah yaitu meningkatkan skala usaha.

Survey menggunakan Kuesioner Keyakinan Motivasi menunjukkan bahwa dari sejumlah UKM yang telah dibina pemerintah melalui program pendidikan dan pelatihan, hanya sebagian kecil yang benar-benar mengikutinya untuk mengembangkan skala usaha. Sebagian besar lainnya memiliki motivasi yang berbeda, yang kurang atau bahkan tidak relevan dengan cita-cita pemerintah untuk meningkatkan skala usaha di NTB, yang hampir 99% adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin pencapaian tujuan, pemerintah perlu menerapkan sistem rekrutmen untuk menjangkau binaan yang memiliki tujuan yang sejalan. Adapun rincian metodologi penelitian dibahas pada bagian dua naskah ini. Hasil dan pembahasan diuraikan pada bagian tiga, menjelaskan temuan-temuan berdasarkan pendekatan yang sudah dipilih. Sebagai penutup, kesimpulan dan rekomendasi disampaikan pada bagian akhir dari artikel ini.

2. METODE

2.1 Ruang Lingkup

Terdapat beberapa jenis program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk UKM yaitu pendidikan dan pelatihan, fasilitasi legalitas usaha, serta bantuan mesin dan peralatan. Pada studi ini, ruang lingkup dibatasi pada program pembinaan berupa pendidikan dan pelatihan, karena program ini memiliki intensitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan program pembinaan yang lain. Selain itu, keterjangkauannya secara kuantitas juga lebih besar.

2.2 Objek Penelitian

Pembinaan melalui program pendidikan dan pelatihan menjadi tanggung jawab Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB. Untuk itu, pengambilan data dilakukan dari objek penelitian yaitu para peserta pendidikan dan pelatihan di Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB sepanjang tahun 2019, sebanyak 450 orang.

2.3 Pendekatan dan Alat

Dalam rangka mengetahui tujuan dari para objek penelitian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB, pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan Teori Hirarki Kebutuhan Maslow (*Maslow's Hierarchy of Needs*). Teori ini mengatakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki lima jenis motivasi atau ke depannya akan dibahasakan sebagai tujuan, yang mendasari tindakan-tindakan atau pengambilan keputusannya. Tujuan pada tingkatan yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar, tujuan pada tingkatan yang kedua adalah perolehan rasa aman, tujuan pada tingkatan yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan bersosialisasi, tujuan pada tingkatan yang keempat adalah

perolehan rasa penghargaan atau prestise, dan tujuan pada tingkatan yang kelima adalah pencapaian aktualisasi diri untuk berkembang.

Untuk mengetahui tujuan seseorang, dapat dilakukan survey menggunakan kuesioner, dan sudah tersedia kuesioner yang mampu secara khusus menggali hal ini, yaitu Kuesioner Keyakinan Motivasi. Kuesioner ini merupakan alat ukur dalam psikologi terapan, milik Human Resource Specialist, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dalam kuesioner ini, terdapat masing-masing empat buah pertanyaan yang merujuk pada tiap-tiap jenis tujuan. Pilihan jawaban menggunakan skala likert, dimana semakin besar angka yang dipilih maka semakin besar kecenderungannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Interpretasi Teori Kebutuhan Maslow

Teori Hirarki Kebutuhan Maslow adalah teori yang berlaku secara general. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan suatu peristiwa atau kejadian, perlu dilakukan interpretasi. Interpretasi ini memang dapat membuka ruang diskusi tergantung dari sudut pandang pihak yang melakukan intepretasi, namun jika merujuk pada konsep dasar Teori Kebutuhan Maslow, hal ini tidak sulit untuk dilakukan. Berkaitan dengan program pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, para peserta yang mengikutinya dengan tujuan sesuai interpretasi yang dituangkan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Interpretasi Teori Kebutuhan Maslow pada Program Diklat

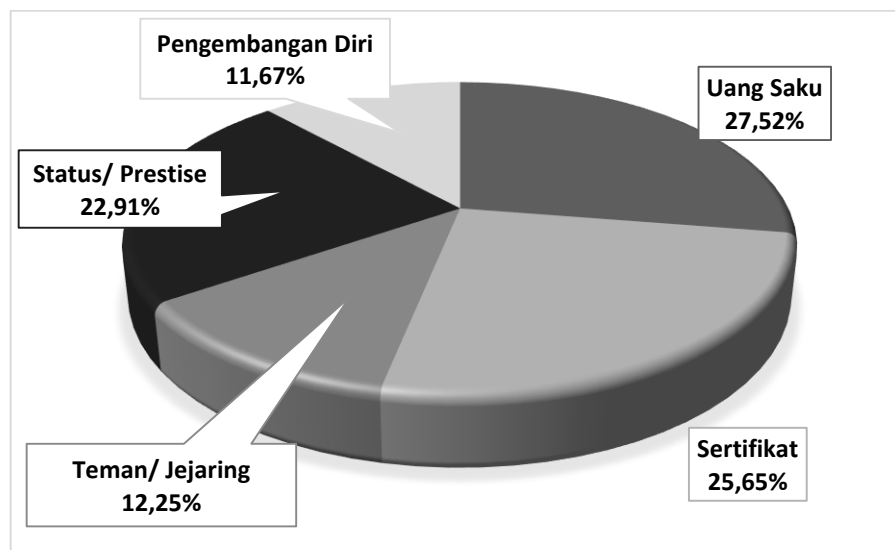
Hirarki Kebutuhan	Teori Kebutuhan Maslow	Interpretasi
Level 1	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Perolehan Uang Saku
Level 2	Perolehan Rasa Aman	Perolehan Sertifikat
Level 3	Pemenuhan Kebutuhan Bersosialisasi	Perolehan Teman Baru/ Pembuatan Jejaring
Level 4	Perolehan Rasa Penghargaan/ Prestise	Perolehan Status
Level 5	Pencapaian Aktualisasi Diri	Potensi Pengembangan Diri

Berkaitan dengan program pendidikan dan pelatihan, jika dorongan yang dominan ada pada diri seseorang adalah dorongan level 1, maka dapat dikatakan bahwa tujuannya mengikuti program pendidikan dan pelatihan adalah untuk mendapatkan uang saku. Sebab, pada kenyataannya dan sesuai aturan yang berlaku, setiap peserta berhak mendapatkan uang harian dan uang transportasi seuai dengan jarak lokasi domisilinya. Jika dorongan yang dominan ada pada diri seseorang adalah dorongan level 2, maka dapat dikatakan bahwa tujuannya mengikuti program pendidikan dan pelatihan adalah untuk mendapatkan sertifikat sebagai bentuk legalisasi. Sebab sesuai prosedurnya, para peserta yang telah lulus pendidikan dan pelatihan, berhak mendapatkan sertifikat sebagai bukti pemahamannya atas materi atau perihal yang telah diajarkan. Selanjutnya, jika dorongan yang dominan ada pada diri seseorang adalah dorongan level 3, maka dapat dikatakan bahwa tujuannya mengikuti program pendidikan dan pelatihan adalah untuk mendapatkan teman-teman baru yang juga dapat menjadi komunitas atau jejaring barunya. Sebab, pada kenyataannya di setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan, pesertanya cukup banyak (30-60 orang per periode diklat) yang berasal dari 10 kabupaten/ kota se-Provinsi NTB. Jika dorongan yang dominan ada pada diri seseorang adalah dorongan level 4,

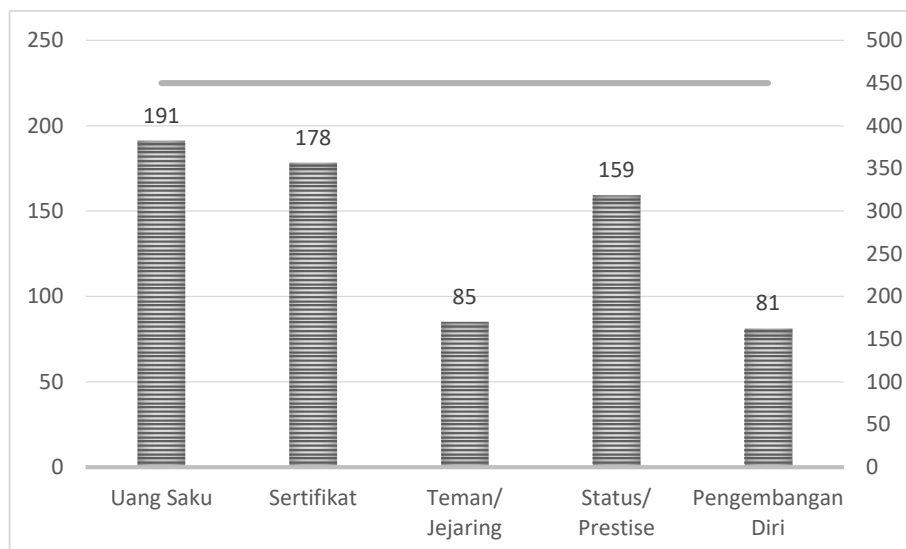
maka dapat dikatakan bahwa tujuannya mengikuti program pendidikan dan pelatihan adalah untuk mendapatkan status sebagai binaan pemerintah. Sebab, status ini dapat menunjukkan relasinya dengan pembuat kebijakan yang secara tidak langsung akan mendongkrak *image* dari seseorang/ usaha tersebut. Terakhir, jika dorongan yang dominan ada pada diri seseorang adalah dorongan level 5, maka dapat dikatakan bahwa tujuannya mengikuti program pendidikan dan pelatihan adalah untuk pengembangan kapasitas dirinya. Sebab secara teori, dorongan pada level ini bukan lagi dipengaruhi oleh faktor luar melainkan dari dalam diri. Seseorang yang memiliki dorongan ini menyadari bahwa secara alamiah manusia adalah individu yang mampu untuk terus berkembang dan salah satu cara untuk mengembangkan diri adalah dengan terus menimba ilmu. Seorang individu yang menjadi pengusaha dan melakukan pengelolaan UKM, jika ingin selalu berkembang maka pasti akan mengembangkan usahanya juga.

3.2 Hasil Survey

Survey yang menggunakan Kuesioner Keyakinan Motivasi telah dilakukan kepada 450 orang peserta program pendidikan dan pelatihan di Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB. Peserta ini merupakan peserta dari 14 angkatan, dari 7 jenis program pendidikan dan pelatihan bagi UKM yang dilaksanakan selama tahun 2019. Secara proporsi, pemetaan hasil survey disajikan pada **Gambar 1**. Sedangkan, persebaran survey secara kuantitas disajikan pada **Gambar 2**.



Gambar 1. Tujuan peserta mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan proporsi



Gambar 2. Jumlah peserta berdasarkan tujuannya mengikuti diklat

Secara proporsi, tujuan mengikuti program pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan diri adalah yang paling kecil. Tujuan yang paling besar proporsinya justru pemenuhan kebutuhan dasar atau untuk mendapatkan uang saku. Tujuan dengan proporsi terbesar kedua adalah pemenuhan rasa aman melalui legalitas atau untuk mendapatkan uang saku. Tujuan dengan proporsi terbesar ketiga adalah pemenuhan rasa prestise atau untuk mendapatkan label sebagai binaan pemerintah. Selanjutnya, tujuan dengan proporsi kedua terkecil yang pada dasarnya cukup relevan untuk pengembangan usaha UKM, adalah pemenuhan kebutuhan bersosialisasi atau untuk mendapatkan teman dan jejaring baru.

Namun jika diperhatikan secara kuantitas, total kuantitas dari kelima jenis tujuan adalah lebih dari jumlah peserta yang disurvei. Hal ini menunjukkan bahwa, pada seorang individu, mungkin terdapat lebih dari satu prioritas tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, dua pasang tujuan yang paling sering muncul adalah tujuan untuk mendapatkan uang saku dan sertifikat. Dua pasang tujuan yang kedua paling sering muncul adalah tujuan untuk mendapatkan sertifikat dan status sebagai binaan pemerintah. Sedangkan mengenai tujuan level kelima, pada gambar 2 ditunjukkan bahwa yang memiliki tujuan demikian adalah sebanyak 81 orang. Namun, saat diteliti lebih jauh, peserta yang murni memiliki tujuan untuk pengembangan diri, tanpa diikuti oleh tujuan lain hanya berjumlah 24 orang. Mengingat tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan skala UKM, maka seyogyanya keseluruhan atau sebagian besar peserta yang mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pemerintah, memiliki tujuan untuk pengembangan diri demi mengembangkan skala usahanya.

3.3 Implikasi

Berdasarkan tujuan-tujuan yang dominan pada para peserta program pendidikan dan pelatihan yang dijalankan pemerintah, dapat disadari bahwa tujuan pemerintah selaku pelaksana program (untuk meningkatkan skala usaha UKM), belum betul-betul sejalan dengan tujuan UKM yang dijejaring menjadi peserta. Sebagian besar UKM, saat mengikuti program pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan lain yang kurang atau bahkan tidak relevan untuk pengembangan usahanya.

Keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) program mungkin tercapai karena program telah dilaksanakan sebagaimana direncanakan. Namun mengenai manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) sulit untuk dijamin. Tujuan-tujuan lain dari UKM dalam mengikuti program pemerintah dapat menjadi hambatan pada pencapaian indikator kinerja pemerintah yang sudah ditetapkan, sebab ketidak-sesuaian tujuan ini akan menyebabkan lemahnya kemanfaatan dari program pendidikan dan pelatihan yang sudah dilaksanakan. Pada akhirnya, lemahnya kemanfaatan program menyebabkan tidak terwujudnya dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut.

4. KESIMPULAN

Ketidak-tercapaian target program pemerintah dapat digali penyebab tidak hanya dari sisi pelaksana atau pemerintah itu sendiri, tapi juga dari sisi penerima program pemerintah. Melalui survey yang menggunakan pendekatan Teori Kebutuhan Maslow, diketahui bahwa target indikator kinerja pemerintah belum tercapai karena adanya ketidak-sesuaian antara tujuan pemerintah yang ingin meningkatkan skala UKM menjadi lebih tinggi, dengan tujuan penerima program pembinaan pemerintah. Hanya sebagian kecil pelaku UKM yang mengikuti program pembinaan pemerintah betul-betul untuk mengembangkan usahanya. Sebagian besar lainnya memiliki tujuan yang kurang atau bahkan tidak relevan dengan pengembangan usaha. Dengan demikian, dapat direkomendasikan agar penjangkaran penerima program pembinaan pemerintah dilakukan melalui sistem rekrutmen yang seksama.

5. DAFTAR REFERENSI

- [1] Anonim, 2018. Jumlah UKM Se-NTB Data BPS Tahun 2006-2018. *Website Diskop NTB*, tanggal 26 November 2018. Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB
- [2] Anonim, 2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Setda Provinsi NTB.
- [3] Wallis, J.&Dollery, B., 2001. Government Failure, Social Capital and the Appropriateness of New Zealand Model for Public Sector Reform in Developing Countries. *World Development Journal*, 29, 245-263.
- [4] Damoah, I. S., Akwei, C.A, Amoako, I. O.,&Botchie, D., 2018. Corruption as a Source of Government Project Failure in Developing Countries: Evidence From Ghana. *Project Management Journal*, 49 (3), 17-33.
- [5] Aladnawi, A. M., 2016. Corruption as a Source of e-Government Projects Failure in Developing Countries: A Theoretical Exposition. *International Journal of Information Management*, 36, 105-112.
- [6] Mpinganjira, M., 2013. E-Government Project Failure in Africa: Lessons for Reducing Risk. *African Journal of Business Management*, 7 (32), 3196-3201.
- [7] Hussain, I, Farooq, Z., & Akhtar, W., 2012. SMEs Development and Failure Avoidance in Developing Countries Through Public Private Partnership. *African Journal of Business Management*, 6 (4), 1581-1589.